

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN POLSEK TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM  
MENERTIBKAN BALAP LIAR BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT  
FRESFEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syar'iah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH**

**NINA RAHMA PANGGABEAN**

**NIM . 11724202947**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1442 H/2021 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Dilingkungan Stadion Utama Riau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : NINA RAHMA PANGGABEAN

NIM : 11724202947

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 1442 H  
2021 M

Pembimbing Skripsi

**IRFAN ZULFIKAR, M.Ag**  
NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Di Lingkungan Stadion Utama Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Fresfektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh :

Nama : Nina Rahma Panggabean  
NIM : 11724202947  
Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ujian Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H.Rahman Alwi , M.Ag**

Sekretaris  
**Marzuki, M.Ag**

Penguji I  
**Kamiruddin, M.Ag**

Penguji II  
**Harwir, M.Ag**

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr.Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Nina Rahma Panggabean, (2021): Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru dalam menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah**

**ABSTRAK**

Balap liar merupakan merupakan suatu pelanggaran lalu lintas dan lebih banyak mengandung unsur negatif. Dengan banyaknya yang melakukan aksi balap liar di Stadion Utama Riau perlu adanya peran dari Polsek Tampan Kota Pekanbaru. Para pelaku balap liar dalam melakukan aksinya tidak menggunakan standar keamanan berlalu lintas seperti jaket, sarung tangan, spions, knalpot suaranya berisik dan lain sebagainya. selain itu aksi balap liar ini juga dapat membahayakan nyawa pelaku dan pengendara lain. Tidak hanya di sore hari namun aksi balap liar ini mereka lakukan di malam hari. Selain menjadi tontonan gratis aksi balap liar ini juga menjadi wadah perjudian. Padahal Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan adalah bagaimana peran Polsek Tampan dalam menertibkan balap liar di lingkungan Stadion Utama Riau?, apa faktor-faktor yang mempengaruhi polsek tampan dalam menertibkan balap liar di lingkungan stadion utama riau, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polsek tampan pekanbaru dalam menertibkan balap liar. Penelitian ini merupakan Penelitian lapangan (*Field Research*) yang dimana berlokasi di polsek tampan kota pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, untuk mengetahui hasil penelitian maka digunakan teknik observasi dan wawancara, sebagai data primer yang didapat dari pihak polsek tampan Kota Pekanbaru dan pelaku balap liar. Selanjutnya, untuk data sekundernya adalah data yang didapat dari buku-buku terkait dengan masalah yang diteliti.

Dari uraian yang disajikan dan tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait penanganan terhadap penertiban balap liar di lingkungan stadion utama riau sudah mencapai sebuah peran, di mana memberikan sanksi berupa denda uang, tilang, nasehat, sosialisasi, penyuluhan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi polsek tampan kota pekanbaru dalam menertibkan balap liar di lingkungan stadion utama riau yaitu Karena Dapat mengganggu ketertiban umum dan kelancaran berlalu lintas, mengganggu warga masyarakat yang sedang berolah raga baik sipejalan kaki, pesepeda, motor dan mobil yang melintas, Membuat orang tua khawatir, dan berakibat fatal bagi pelaku balap liar. Tinjauan fiqh siyasah yang berkaitan dengan masalah ini adalah Siyasah Dusturiyah dimana pemimpin harus bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya untuk kemaslahatan rakyatnya, disini menurut penulis peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru sudah sesuai untuk kita semua agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan nyawa baik diri sendiri maupun orang lain untuk kemaslahatan agar tidak mengabaikan peraturan-peraturan yang ada dan hal ini sudah sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

**Kata kunci : Polsek, Balap liar, Fiqih Siyasah**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: “peran polsek tampan kota pekanbaru dalam menertibkan balap liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Menurut prespektif Fiqih Siyasah” Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada sang revolusioner abadi Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya yang berjudul “peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Balap Liar di Lingkungan Stadion Utama Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Menurut prespektif Fiqih Siyasah” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1.

Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berharga bagi penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada pada penulis, telah penulis keahkan untuk menyelesaikan karya ini sehingga dapat tersajikan dihadapan saudara pembaca, sehingga penulis menjadikan judul ini sebagai tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Rampungnya penulisan ini tentunya tidak lepas dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan keluarga, kalangan akademik UIN SUSKA RIAU dan rekan-rekan sekalian. Karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta ibunda Erti Ritonggaran Ayahanda tercinta Ali Muda Panggabean (ALM). Beserta seluruh keluarga besar panggabean : M.syawal panggabean S.I.KOM, Siti Lamsana panggabean, Masrita panggabean S.E, Muriati Purnama panggabean, Nur Ajizah panggabean S.H, Ismail panggabean dan Serli panggabean. Yang telah memberikan semangat dan dorongan yang tidak ternilai harganya.
2. Bapak Prof. Dr.khairunnas, M. Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum , Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S. Ag, M. Ag, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Magfiroh, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah membina penulis selama kuliah di fakultas syariah dan hukum
4. Bapak Rahman Alwi, S. Ag, MA dan Bapak IrfanM.Ag selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku pembimbing konsultasi proposal dan sekaligus skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masuk kepada penulis Skripsi ini dengan baik dan benar seperti yang diharapkan.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Untuk polsek tampan kota pekanbaru yang telah megizinkan penulis melakukan penelitian, dan untuk kawan-kawan Seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2017,terkhusus kepada saudara Masitha nur Rohima, Ely yanur, Mardiani harahap,Septi piyola, Nahdia Dulsan, Nurul Nabila, Nur aisyah, Robiatul adwiya, Lusiana putri, Riny Nurhayati,Manisa dwi putri,Nike.

Penulis tentunya tidak menapikan bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Penulis,

Nina Rahma panggabean  
NIM: 11724202947

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Menfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Gambaran Umum Stadion Utama Riau.....	16
1. Sejarah Singkat Stadion Utama Riau .....	16
2. Letak Stadion Utama Riau .....	18
3. Sosial Kemasyarakatan .....	18
4. Sosial Ekonomi Masyarakat .....	19
B. Gambaran Umum Polsek Tampan Pekanbaru .....	20
1. Sejarah Berdirinya Polsek Tampan Kota Pekanbaru .....	20
2. Visi Dan Misi Polsekta Tampan .....	24
3. Fungsi dan Peran Kepolisian.....	25
4. Kewenangan Kepolisian .....	25
5. Tugas dan Struktur polsek tampan .....	26
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Peran.....	29
1. Definisi peran .....	29
2. Teori peran .....	31
B. Tinjauan Tentang Balap Liar.....	32



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Balap Liar.....	32
2. Faktor penyebab balap liar .....	34
3. Dampak negatif balap liar .....	35
C. Sanksi Hukum Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	36
D. Siyasah Dusturiyah.....	38
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Figih Siyasah .....	38
2. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	41
3. Objek Kajian Figih Siyasah.....	43
4. Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah .....	44
E. Peran Pemimpin Dalam Islam.....	53
F. Polisi Dan Kepolisian.....	55
1. Istilah Polisi dan Kepolisian.....	55
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian NRI .....	56

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertiban Balap Liar di Lingkungan Stadion Utama Riau .....	62
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Penertiban Balap Liar di Lingkungan Stadion Utama Riau .....	68
C. Tinjauan Figih Siyasah Terhadap Penertiban Balap Liar di Lingkungan Stadion Utama Riau kota Pekanbaru .....	69

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	75

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masa perkembangan manusia adalah masa remaja. Masa ini masa yang sangat menentukan perjalanan selanjutnya kehidupan setiap manusia. Masa remaja merupakan masa yang rentan karena pada masa ini proses pencarian jati diri sementara berlangsung sehingga remaja mudah terjerumus terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dari minuman keras, berjudi, ugal-ugalan di jalan raya, pencurian, penjambeitan, dan lain sebagainya. Masa remaja merupakan masa transisi, atau yang biasa disebut dengan usia belasan yang meyenangkan, dimana terjadi juga perubahan baik secara fisik, fisikis, maupun secara sosial.<sup>1</sup>

Salah satu kenakalan remaja yang sering terjadi adalah kegiatan balap liar motor. Banyak remaja yang lebih menuruti ego dan keinginan perkumpulanya dari pada memikirkan keselamatanya, hanya didasari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal. mengadu kecepatan berkendara yang dimilikinya, berebut pacar, atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan kegiatan balap liar. Kenakalan remaja merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain.<sup>2</sup>

<sup>1</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja> di akses pada tanggal 28 april 2021 pukul 14:14

<sup>2</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Balap\\_motor](https://id.wikipedia.org/wiki/Balap_motor) di akses pada tanggal 28 april 2021 pukul

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dunia balap motor tidak dapat dipisahkan dari ajang balap motor liar. Dunia balap motor seharusnya dilakukan secara profesional, namun kemudian berkembang menjadi balap motor liar. Balap motor liar merupakan suatu ajang yang diselenggarakan tanpa izin yang kerap kali dilakukan di tempat umum dan kegiatan balap motor liar ini sama sekali tidak dilakukan dilintas balap resmi, melainkan di jalan raya. Balap liar ini menjadi ajang mencari gengsi antar remaja, juga sebagai wadah perjudian di mana setiap dilakukan balapan selalu ada uang taruhan dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ajang balap motor liar ini merupakan kegiatan yang tergolong sangat berbahaya karna dilakukan tanpa persyaratan khusus. Selain membahayakan bagi diri sendiri namun juga membahayakan orang lain.<sup>3</sup>

Perilaku balap liar yang dilakukan oleh remaja merupakan hasil dari proses panjang yang dilihat dari media, proses terjadinya efek suatu tayangan dalam bentuk perilaku dimulai dari tahap kesadaran individu, perhatian, tahap evaluasi, coba-coba dan adopsi. Hal ini terlihat dari adanya penanaman makna dan pesan tertentu dalam adegan-adegan balapan pada Moto Gp, sehingga mempengaruhi pemikiran, konsepsi, dan sikap remaja tentang dunia balapan.<sup>4</sup>

Balap liar dikategorikan Perjudian karena kegiatan ini selalu ada pertarungan sejumlah uang atau barang, dimana yang menang mendapatkan uang taruhan atau barang. Judi dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat

<sup>3</sup>[https:// konsultasi syariah..com/22308/tata lalu lintas termasuk ibadah hal I.](https://konsultasi.syariah.com/22308/tata-lalu-lintas-termasuk-ibadah-hal-i) diakses pada tanggal 24 februari 2021 pukul 12 :00 Wib.

<sup>4</sup>*ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

diduga sebelumnya. judi dalam kata arti lain adalah nasib dan segala bentuk permainan bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala pertarungan yang bertaruh ikut dalam permainan tersebut, termasuk segala macam pertarungan lain.<sup>5</sup> Di dalam al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 90 Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamer, berjudi, (berkorban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan Syetan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.* (Q.S. Al-Maidah : 90).<sup>6</sup>

Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 90 di atas, Imam Abu Ja'far di dalam kitab Tafsirnya berkata : Allah SWT. Lalu menjelaskan berbagai perkara yang diharamkan kepada mereka, yang jika mereka menghalalkan dan mengonsumsinya , Maka mereka termasuk orang-orang melampaui aturan-Nya. Allah SWT. menyatakan, “wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Khamer yang biasa kalian minum, judi yang biasa kalian lakukan, berhala yang biasa kalian berikan persembahan dengan menyembelih di sisinya, dan anak-anak panah yang biasa kalian jadikan sebagai alat untuk mengundi nasib adalah kotor.”<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Johanes Papu Sejarah dan Jenis Perjudian, diakses dari [www.gogle.co.id](http://www.gogle.co.id) pada Tanggal 7 September 2020 pukul 20:17Wib

<sup>6</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, 2009), hlm.123.

<sup>7</sup> Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Akhmad Affandi (Jakarta : Pustaka Az-Zam, 2016), hlm . 360.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maknanya dosa, kotor, dan di benci Allah SWT. “Termasuk perbuatan syetan.” Maksudnya adalah, minuman Khamer, berjudi, menyembelih untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, masuk dalam kategori hiasan Syetan bagi kalian, bukan sama sekali perbuatan yang diperintahkan oleh Rabb kalian. Termasuk perkara yang dibenci-Nya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, maksudnya yaitu, tinggalkanlah, tolaklah, dan janganlah kalian melakukannya Agar kamu mendapat keberuntungan, maksudnya adalah agar kalian selamat, lalu mendapatkan keberuntungan dari Rabb kalian dengan meninggalkan semua itu.<sup>8</sup>

Dari ayat Al-Qur'an diatas, maka dapat di pahami bahwa hukum permainan judi balap liar adalah haram dan perbuatan dosa besar. Perilaku Balap liar ini mengganggu kemaslatan banyak orang selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain.

Adi Bhari menyatakan bahwa sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spions, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Tidak lengkap perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, dan gangguan ketertiban umum.<sup>9</sup>

Adapun dasar hukum dari aksi balapan liar yang dilakukan tentang pelanggaran ketertiban umum diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membahayakan keselamatan jiwa seseorang yang diatur dalam

<sup>8</sup> Ibid. hlm. 361.

<sup>9</sup> Adib Bhara, 125 *Tanyak jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, ( Yogyakarta: Pusta Yustika, 2010), hlm.85.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>10</sup>. Dan juga diatur diluar kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam melaksanakan tugas dan keseriusan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi penertiban balap liar dan memberikan sanksi secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal II5 huruf b dan pada pasal 297 menyebutkan bahwa di pidana dengan pidana yang menegaskan dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun atau denda paling banyak RP.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah). Akan tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan semestinya hukum berlaku ketika pelaksanaan di lapangan, Dengan kata lain hukum tidak berjalan atau tidak relevan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. ketika pelaku balap liar tertangkap dalam razia balap motor mereka hanya dikenakan sanksi pembinaan. Setelah mendengarkan ‘ceramah’ dari pihak kepolisian, mereka diizinkan untuk pulang, mereka kemudian melanjutkan lagi adu balap motor tersebut tanpa mengenal rasa takut.<sup>11</sup>

Fenomena budaya balap liar yang dilakukan oleh pemuda maupun remaja semakin marak. Di Indonesia sendiri, sudah menjadi rahasia umum bahwa ajang balap liar sudah menjangkit banyak anak muda Indonesia. Hal

<sup>10</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 503, Pasal 539 dan Pasal 360. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

<sup>11</sup> Lihat pasal 115 huruf b, Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

ini terjadi terutama di kota-kota maupun pedesaan, salah satunya yang terjadi adalah di kawasan stadion utama riau di jalan Naga Sakti, kecamatan tampan Pekanbaru Riau. Aksi balap liar ini sudah cukup lama berlangsung di kawasan stadion olahraga. Di mana pelanggaran lalu lintas tersebut berupa balap liar yang dilakukan pada sore hari, selain sore mereka juga melakukannya di malam hari kegiatan balap motor ini biasanya di lakukan tanpa menggunakan standar keamanan dan keselamatan berkendara. seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, ban tidak ukuran standar, knalpot yang bersuara keras, kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan standar keamanan dan keselamatan pengendara, tidak memakai alat-alat berkendara yang semestinya seperti penggunaan helm, sarung tangan, pelindung siku dan jaket berkendara, maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Sering kali motor yang mereka pakai untuk beradu kecepatan juga tidak dilengkapi dengan surat yang seharusnya. Sebagai sarana keselamatan berkendara.<sup>12</sup>

Selain di gerbang pintu masuk mereka juga kerap kali berkumpul di area belakang stadion .Aksi kebut-kebutan di jalan umum ini juga memicu terjadinya kemacetan sehinga mengganggu kelancaran lalu lintas Meskipun telah sering ditertibkan pihak kepolisian aksi balap liar ini masih sering terjadi.<sup>13</sup>

Melihat dari gejala gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian penelitian yang penulis tuangkan di dalam sebuah karya

<sup>12</sup> *Ejournal Ilmu Komunikasi* , 2014, 2 (2) : 39-48 ISSN 0000-0000, ejoernal. Ikom. Fisip unmul. ac.id.2014.di akses pada 11 september 2020 pukul 17:30 Wib

<sup>13</sup> *ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PERAN POLSEK TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM MENERTIBKAN BALAP LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**.

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan peneliti ini pada Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru dalam menertibkan balap liar di berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Polsek Tampan dalam menertibkan balap liar di lingkungan Stadion Utama Riau, serta peran Polsek Tampan dalam menertibkan balap liar di lingkungan Stadion Utama Riau menurut perspektif Fiqih Siyasa.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas ,pokok permasalahan dalam penelitian ini rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Polsek Tampan dalam menertibkan balap liar di lingkungan Stadion Utama Riau berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru dalam menertibkan balap liar di lingkungan Stadion Utama Riau?
3. Bagaimana Peran Polsek Tampan dalam menertibkan balap liar di lingkungan Stadion Utama Riau menurut perspektif Fiqih Siyasah?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dikemukakan tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran polsek tampan Pekanbaru dalam penertiban balap liar menurut Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban balap liar di lingkungan stadion utama riau.
- c. Untuk mengetahui peran Polsek Tampan dalam menertibkan balap liar di lingkungan Stadion Utama Riau menurut perspektif Fiqih Siyasah?

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Sisayah) yang berkaitan tentang peran polsek tampan kota pekanbaru dalam menertibkan balap liar di



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan stadion utama Riau berdasarkan UU Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti-peneliti sejenis,pada masa yang akan mendatang.

**b. Secara Praktis**

- 1) Bagi peneliti,hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) terutama yang berkaitan dengan peran polsek tampan kota pekanbaru dalam penertiban balap liar di kawasan stadion utama riau .
- 2) bagi masyarakat ,hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana peran polsek tampan kota pekanbaru dalam penertiban balap liar di kawasan stadion utama riau danbagaimanakah revalisansi sanksi yang di berikan terhadap pelaku balap liar.
- 3) Bagi instansi /pemerintahan, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan keterangan yang jelas tentang peran polsek tampan kota pekanbaru dalam penertiban balap liar dan revaliansi sanksi terhadap pelaku balap liar berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

**c. Secara Akademik**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum (SH) .
- 2) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara (Siyasah)
- 3) Bagi peneliti lain, dapat di jadikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan sabar dan hati-hati, terencana, sistematis, atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.<sup>14</sup> Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian sosiologis Hukum dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data skunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara, observasi, dan kajian kepustakaan yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca, dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.

<sup>14</sup> Jusup Soewadji, pegantar metodologi penelitian, (Jakarta : Mitra Wacana Media 2012), hlm. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil Lokasi di polsek tampan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena lokasinya mudah dijangkau oleh penulis .

## **3. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah polsek Tampan kota Pekanbaru dan pelaku Balap Liar Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru dalam menertibkan balap liar di lingkungan Stadion Utama Riau.

## **4. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama . populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, khusus-khusus, waktu dan tempat dengan sifat dan ciri yang sama .sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagai dari populasi. <sup>15</sup>populasi dalam penelitian ini berjumlah 75 orang dari keseluruhan anggota polsek Tampan jadi peneliti mengambil Sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang polsek tampan yang bergerak dalam pelaksanaan operasi balap liar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah poposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui masalah mendalam. Selanjutnya untuk populasi pelaku balap

<sup>15</sup> Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta : Rajawali Pres, 2012), hlm.116.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

liar dari keseluruhan sekitar 15 orang jadi dari jumlah keseluruhan tersebut peneliti mengambil 3 orang pelaku balap liar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Accidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.

#### 5. Sumber dan Jenis Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak kepolisian yang ikut serta dalam operasi penertiban balap liar yang merupakan sumber informasi terutama guna memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan yang dihadapi yaitu informasi tentang penertiban balap liar di kawasan lingkungan stadion utama riau dan Pelaku Balap Liar .
- b. Data sekunder, merupakan data yang melengkapi data primer, yang di dapat dari buku-buku , jurnal, Al-Qur'an , internet dan undang-undang yang erat kaitanya dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Data tersier, merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan skunder .dalam hal ini Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) .<sup>16</sup>

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

<sup>16</sup>Amiruddin, pegantar Metodologi penelitian Hukum, (Jakarta : PT Rajawali persada, 2003), hlm 30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, adalah mencurahkan segenap alat indra terutama pengamatan mata untuk mengamati fokus objek yang diselidiki atau yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, dalam penelitian ini polsek tampan pekanbaru dan pelaku balap liar, menunjukan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang ingin serta yang dianggap perlu dalam penelitian.
- c. Dokumentasi, adalah pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat data dan observis dan wawancara.
- d. Studi Pustaka, adalah teknik Pengumpulan Data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan.<sup>17</sup>

**7. Analisis Data**

Analisis Data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi lapangan. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang

---

<sup>17</sup>Burhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm 26.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang diteliti.<sup>18</sup>

## 8. Metode Penulisan

Deskriptif Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara umum ke khusus. dengan fakta<sup>19</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulisan dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang sejarah singkat polsek tampan dan sejarah singkat Stadion utama Riau, keadaan geografis, dan lain sebagainya.

### BAB III : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tinjauan umum tentang Peran, tinjauan Balap Liar, Sanksi hukum Balap Liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

<sup>18</sup>Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, ( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 60.

<sup>19</sup>Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, CV, 2014), hlm. 25



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angkutan Jalan, dan Siyasah Dusturiyah, Peran pemimpin dalam islam, polisi dan Kepolisian.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Bagaimana Peran Polsek Tampan dalam menertibkan balap liar di lingkungan Stadion Utama Riauberdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru dalam menertibkan balap liar di lingkungan Stadion Utama Riau dan peran Polsek Tampan kota pekanbaru menertibkan balap liar di lingkungan Stadion Utama Riau menurut perspektif Fiqih Siyasah?

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dansaran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Stadion Utama Riau

##### 1. Sejarah Singkat Stadion Utama Riau

Stadion Utama ini terletak di jalan Naga Sakti Panam Pekanbaru atau dikawasan kampus Universitas Riau (UR) Panam. Stadion ini dibangun pada tahun 2009 untuk menyambut Pekan Olah raga Nasional (PON) XVIII Riau tahun 2012. Luas lokasi Stadion ini kira-kira 66,4 Ha, dan luas gedung 7,4 Ha, dan menghabiskan biaya sebesar Rp.858 Miliar. Stadion ini merupakan stadion utamadi *event* tersebut. Dengan arsitektur modern akan menjadikan stadion ini sebagai stadion terbaik di Indonesia. Untuk mencapai keinginan tersebut, maka perancangnya (arsitek) sengaja didatangkan dari Jakarta dan bekerjasama dengan bidang sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau. Untuk menampilkan *performance* yang menarik, maka pembangunan stadion utama Riau menggunakan konsep yang serba modern. Bentuknya yang mengadopsi rangka perahu yang menggambarkan masyarakat Riau pada zaman dahulu hidup sebagai nelayan dan bahan yang digunakan dominan material import. Seperti halnya untuk atap sengaja di datangkan dari Yunani.<sup>20</sup>

Sementara pelapis rangka menggunakan *aluminium composif panel* (ACP) dari Jerman, lintasan sintetis dari Belanda, scoring board dari USA,

<sup>20</sup>www.pekanbaruexpress.com Diakses pada tanggal 24 februari 2021 pukul 14:33 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumput dari Brazil dan *sound system* dari Jerman. Sementara untuk *lightingnya* dibangun secara permanen di setiap sudut gedung.<sup>21</sup>

Namun, kondisi stadion saat ini, sudah mulai tidak terawat dan sangat memperhatikan beberapa sisi bangunan terlihat terkelupas, tiang bendera bercat putih yang mengelilingi stadion itu beberapa diantaranya bahkan di biarkan roboh. Susunan paving juga tampak berantakan, beberapa terlepas hingga membuat halaman tak sedap dipandang. Di bagian barat, tampak percikan kaca pecah masih berserakan, termasuk di beberapa pos penjagaan pintu masuk, sebagian besi dari bangunan yang terlihat berkarat.<sup>22</sup>

Rerumputan liar bahkan tumbuh tinggi di arena sepakbola, pohon yang tidak lagi hijau bahkan kering tanpa daun, juga beberapa tebing ikut longsong tergerus air mengalir. Di balik itu, sampah-sampah sisa barang dagangan dan bungkus para pengunjung kian berserakan. Menambah kegalauan bangunan yang sempat masuk nominasi sebagai stadion terbaik di dunia. Alasan sampah-sampah itu berserakan adalah karena tidak tersedianya tempat sampah di sepanjang jalan.<sup>23</sup>

Hal ini disebabkan karena tidak adanya pihak yang mengelola dan merawat Stadion Utama Riau ini. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Provinsi Riau, H. Emrizal Pakis, untuk pengelolaan Stadion Utama Riau ini masih belum di bicarakan secara rinci dan mendalam.” Stadion Utama Riau ini belum diserahkan. Jadi

---

<sup>21</sup> *ibid*

<sup>22</sup> *ibid*

<sup>23</sup> *ibid*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum bisa dipastikan siapa yang mengelolanya” kata Emrizal Pakis kepada Riau Pos. Jadi belum ada struktur organisasi pengelolaanya.<sup>24</sup>

## **2. Letak Stadion Utama Riau**

Stadion utama Riau terletak di jalan Naga Sakti Panam Kecamatan Tampan Pekanbaru dengan batas-batas kelurahan sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar kelurahan Rimbo Panjang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Delima.
3. Sebelah Selatan Jalan Hr. Soebrantas/ kelurahan Tuah Karya.
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Payung Sekaki.<sup>25</sup>

## **3. Sosial Kemasyarakatan**

Stadion utama Riau ini, selain digunakan untuk pembukaan dan pertandingan sepak bola PON tahun 2012 lalu juga pernah dipakai untuk para piala Asia U22 namun setelah itu, stadion ini praktis tidak pernah difungsikan sama sekali sampai saat ini. Kondisinya saat ini sungguh memperhatikan, bahkan jaringan listrik sudah diputus PLN karena tunggakan tagihan. PSPS yang pada musim lalu masih bermain di ISL juga tidak menggunakan stadion ini namun lebih banyak bermain di

<sup>24</sup> [www.riau-pos.co/656-spesial-pengelolaan-Venue-belum-final-htm](http://www.riau-pos.co/656-spesial-pengelolaan-Venue-belum-final-htm). diakses pada tanggal 24 februari 2021 pukul 14:33 WIB

<sup>25</sup> <http://m.riau-pos.co/35057-berita-angka-kriminalitas-di-stadion-utama> diakses pada tanggal 24 februari 2021 pukul 14:33 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangkinang, dan walaupun bermain di Pekanbaru menggunakan stadion Kaharuddin Nasution.<sup>26</sup>

Setelah beberapa waktu yang lalu dijadikan markas oleh geng motor pimpinan kelewang, saat ini kondisi stadion semakin menyedikan, kondisinya yang sepi dan gelap menjadikan kawasan ini rawan kejahatan. Beberapa kali terjadi aksi penodongan dan perampokan terhadap warga yang melintas dikawasan ini, dan seringnya terjadi kehilangan sepeda motor, dan juga di manfaatkan bagi muda-mudi sebagai tempat kemaksiatan.<sup>27</sup>

#### 4. Sosial Ekonomi Masyarakat

Olahraga merupakan suatu hal yang menyenangkan bagi mereka yang memang hobi dengan hal ini. Dan dengan berdirinya Stadion Utama Riau ini sangat mendukung dengan ke hobian masyarakat yang suka berolah raga. Ada berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan di area Stadion Utama Riau ini, misalnya mereka maraton sore, Bersepeda, dan juga dijadikan tempat rekreasi. Kita ketahui bersama saat-saat ini bersepeda merupakan suatu olahraga yang saat ini lagi maraknya dan bahkan adanya istilah “*car free day*”. Karena bersepeda itu bisa membuat kita sehat, dan merupakan olahraga klasik dan saat ini lagi maraknya atau lagi trendnya, dan di Stadion Utama Riau Pekanbaru merupakan salah satu tempat penyediaan penyewaan sepeda panjang, yang bisa di gunakan masyarakat yang memerlukan, jadi dengan adanya penyewaan sepeda panjang di Stadion Utama Riau Pekanbaru, makin membuat masyarakat

---

<sup>26</sup>Ibid.

<sup>27</sup>Ibid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering mengunjungi area Stadion dengan berbagai tujuan, jadi hadirnya sepeda ini sangat direspon oleh masyarakat pekanbaru, dan bahkan makin banyak usaha-usaha lainya yang berkembang di lokasi Stadion Utama ini.<sup>28</sup>

Dengan antusiasnya masyarakat dengan lokasi ini,tentu makin pesat usaha-usaha yang berdiri di lokasi Stadion, seperti adanya pedagang buah, makanan ringan,dan berbagai jenis minuman dan berbagai macam permainan anak-anak. Tentunya hal ini mampu meningkatkan pendapatan keluarga suatu pedagang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan apa yang mereka lakukan telah mampu mengurangi angka pengangguran, kriminalitas ,dan mengurangi angka kemiskinan.<sup>29</sup>

### B. Gambaran Umum Polsek Tampan Pekanbaru

#### 1. Sejarah Berdirinya Polsek Tampan Kota Pekanbaru

Polsek tampan berdiri pada tahun 1998 bertepatan di jl.HR.Subrantas kota pekanbaru.Diresmikan oleh Kapolri polisi Drs.Roesmanhadi, SH pada tanggal 02 November 1998, dan yang menjabat sebagai Kapolsek Tampan yang pertama adalah AKBP Drs. M. Natsir Achmad. polsekta Tampan pada saat itu membawahi 6 polsek antara lain :

- a. Polsekta Pekanbaru kota
- b. Polsekta Senepelan
- c. Polsekta Limapuluh

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Polsek Pesisir
- e. Polsek Tampan
- f. Polsek Bukit Raya

Pada tanggal 03 Desember 2003 sesuai dengan keputusan Kapolri N0.pol: KEP/90/XII/2003, Polsek Tampan yang dijabat oleh AKBP Drs.Muhammad Jupri dengan membawahi 3 polsek Definitif dan 4 polsek persiapan antara lain:

- a. Polsek Definitif
  - 1) Polsek Pekanbaru Kota
  - 2) Polsek Senapelan
  - 3) Polsek Limapuluh
- b. Polsek Persiapan
  - 1) Polsek Pekanbaru Kota
  - 2) Polsek Sukajadi
  - 3) Polsek Tampan
  - 4) Polsek Bukit Raya

Pada tahun 2005 sesuai Skep Kapolda Riau No.pol: SKEP/206/IX/2005 tanggal 28 september 2005, 4 polsek persiapan dalam jajaran polsek pekanbaru berubah menjadi polsek Definitif antara lain:

- a. Polsek Pekanbaru kota
- b. Polsek Senepelan
- c. Polsek Limapuluh
- d. Polsek Pesisir

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. polsekta Tampan
- f. Polsekta Bukit Raya
- g. Polsekta Sukajadi
- h. Polsekta Tenayan Raya
- i. Polsekta SKP
- j. Polsekta Rumbai
- k. Polsek Payung Sekaki

Pada tahun 2007 , sesuai Skep Kapolda Riau N0. Pol: SKEP/226/XII/2007 tanggal 31 Desember pos pol Baru menjadi polsek persiapan Baru. Saat ini polsek 2010 sesuai dengan keputusan Kapolda pekanbaru Nomor: KEP/418/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 menetapkan dan Tipologi polsek dalam jajaran pekanbaru sebagai berikut:

NO	KESATUAN	NOMENKALATUR	TIPOLOGI BARU
1.	Polsekta Pekanbaru Kota	Polsekta Pekanbaru Kota	URBN
2.	Polsekta Senapelan	Polsekta Senapelan	URBN
3.	Polsekta Limapuluh	Polsekta Limapuluh	RURAL
4.	Polsekta Rumbai Pesisir	Polsekta Rumbai Pesisir	RURAL
5.	Polsekta Tampan	Polsekta Tampan	RURAL
6.	Polsekta Bukit Raya	Polsekta Bukit Raya	RURAL
7.	Polsekta Sukajadi Polsek Tenanan Raya Polsekta SKP Polsekta Rumbai Polsekta Payung Sekaki	Polsekta Sukajadi Polsekta Tenanan Raya Polsekta SKP Polsekta Rumbai Polsekta Payung Sekaki	RURAL PRARURAL RURAL RURAL RURAL

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. AKBP. DRS. MOH. NATSIR. ACHMAD  
KAPOLSEK TAMPAN  
PERIODE TAHUN 1999-2001
- b. AKBP. DRS. AGUNG SABAR SANTOSO  
KAPOLSEK TAMPAN  
PERIODE 22 NOVEMBER – 22 FEBRUARI 2003
- c. AKBP. DRS. MOH. JUFRI  
KAPOLSEK TAMPAN  
PERIODE 2003 – 2005
- d. AKBP. DRS. NUGHI KRISTIANTO, MSC  
KAPOLSEK TAMPAN  
PERIODE 13 JULI 2005 – JULI 2006
- e. AKBP. DRS. LEONIDAS BRAKSAN, MM  
KAPOLSEK TAMPAN  
PERIODE 11 JULI 2006 – 04 APRIL 2008
- f. AKBP. DJOKO RUDI. E, SH, S, IK, M, SI  
KAPOLSEK TAMPAN  
PERIODE 04 APRIL 2008 - 22 OKTOBER 2009
- g. AKBP. IMAM SANTOSO  
KAPOLSEK TAMPAN  
PERIODE 22 OKTOBER 2009 – 18 NOVEMBER 2010
- h. AKBP. BENYAMIN SAPTA. T, S.IK, M. SI



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KAPOLSEK TAMPAN

PERIODE 18 NOVEMBER 2010-10 DESEMBER 2010

- i. AKBP SUPARMAN, SIK

KAPOLSEK TAMPAN

PERIODE 10 DESEMBER 2012 .SD SEKARANG

**2. Visi Dan Misi Polsekta Tampan**

**a. Visi**

Meujudkan pelayanan masyarakat yang prima dan menjaga situasi KANTIBMAS yang kondusif dengan kedepankan tugas preemitif, preventif, Represif dan penegakan hukum secara propesional dan profesional serta aktualisasi polmas dan impelementasi Quick Wins.

**b. Misi**

- 1) Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui Quick Wins, Mengurangi pengaduan masyarakat
- 2) Meningkatkan kerja sama masyarakat, timbulkan partisipasi dan peranan masyarakat, melalui perpolisian masyarakat (POLMAS).
- 3) Meningkatkan keterampilan anggota agar propesional dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun kepedulian dan keikhlasan dalam tugas guna menciptakan situasi KAMTIMBAS aman dan tertib.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Fungsi dan Peran Kepolisian

#### a. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

#### b. Peran Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta member perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.

### 4. Kewenangan Kepolisian

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan meneangulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasin aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam, persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret seseorang .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>30</sup>

**5. Tugas dan Struktur polsek tampan**

**a. Tugas Polsek**

- 1) Melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap ancaman kejahatan seperti kejahatan yang berdimensi baru, kejahatan yang menggunakan kekerasan, kejahatan pencurian, dan semua jenis kejahatan yang dapat terdeteksi pihak Kepolisian.
- 2) Melaksanakan kegiatan preventif guna menangkal gangguan keamanan masyarakat melalui kegiatan kemitraan antara polisi dan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kegiatan preventif dalam hal mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran, memberikan rasa aman terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
- 4) Meningkatkan pencegahan represif dalam rangka penegakan hukum dan menindak tegas kepada setiap pelaku kejahatan.
- 5) Mempesiapkan sebuah tindakan apabila kejahatan meresahkan masyarakat dan mengancam keamanan lingkungan.

<sup>30</sup>Dokumentasi Polsek Tampan , Tanggal 18 April pukul 10:55 WIB.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Mempersiapkan personal dan perlengkapan dalam melakukan patrol.
- 7) Melakukan pengamanan setiap ada kegiatan yang dilakukan masyarakat guna menghindari ancaman kejahatan.

b. Struktur Organisasi Polsek Tampan

Kepolisian Sektor (polsek), Struktur polsek secara bertingkat terdiri atas:

- 1) HOTMARTUA ( KAPOLSEK )
- 2) H.HERMAN S.H ( WAKAPOLSEK )
- 3) OMRI S.E ( KANIT PROVAS )
- 4) AMELIA Spd ( KASIH UMUM )
- 5) AHMAD YANI ( KASIH HUKUM )
- 6) ROSMADI ( KASIH HUMAS )
- 7) FITRI AMI ZAINAL ( KA SPKI 1 )
- 8) NOVIARDI ( KA SPKI 11 )
- 9) ADI ZULFIKAR ( KA SPKI 111 )
- 10) NOKI LOVIKO SH.MH ( KANIT RESKRIM )
- 11) PAREL ( KANIT BINMAS )
- 12) LISTIYO BOWORianto ( KANIT SABHARA )
- 13) AFDAL SYAFWAN S.H ( BHABI KATIMBAS )
- 14) ALI BAKRI S.H ( BHABIN KHATIMBAS )
- 15) RIKO FEBRITAMA ( BHABIN KHATIMBAS )<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid.

## A. Peran

### 1. Defenisi Peran

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.<sup>32</sup> Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti

<sup>32</sup>W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 735

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya.<sup>33</sup>

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.<sup>34</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan peran kepolisian dapat diartikan bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha atau kegiatan yang dijalankan kepolisian karena kedudukannya sebagai gerakan pelayanan masyarakat diharapkan dapat memberikan pengaruh pada anggota serta masyarakat sesuai dengan tujuan kepolisian yaitu melayani, mengayomi bagi masyarakat sesuai norma dan moral Islam.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 212-213

<sup>34</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama, 1994), hlm.3



## 2. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi, dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisiseseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.<sup>35</sup> Adapun beberapa Dimensi Peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan prefensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsibel.

<sup>35</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 215

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.<sup>36</sup>

### B. Tinjauan Tentang Balap Liar

#### 1. Pengertian Balap Liar

Pengertian balap dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor adalah kegiatan adu cepat kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.<sup>37</sup>

Balap motor merupakan kegiatan yang sangat berisiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket, dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan seperti spion, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang

<sup>36</sup> Horoeopetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta: Walhi, 2003), hlm. 67

<sup>37</sup> Yosep Dwi Rahadayanto, *Upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar di kabupaten selemang*, Yogyakarta 2014 hlm 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jugak balap motor liar menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.<sup>38</sup>

Menurut kartini kartono, kebut-kebut atau balap motor di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal. pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan moral. Tidak ada pembentukan ego dan super ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. mental dan kemauanya menjadi lemah, hingga implus-implus, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebihan. tingkah laku yang dilakukan tersebut dimaksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.<sup>39</sup>

Pada zaman sekarang di era globalisasi, banyak hal yang berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng dan tidak ada batasnya lagi, banyak di kalangan remaja melakukan hal-hal negatif yang merugikan bukan hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang lain. Contohnya balap liar karena remaja masa kini mempunyai jiwa keigian tahunan yang cukup tinggi yang terpegaruh dari film atau sekedar ingin mencari nama dan dibilang jagoan saja, kenakalan remaja dapat

<sup>38</sup> Goerge Ritzer dan Douglas J Goodman, *teori sosiologi*, (Yogyakarta: kreasi warana, 2013), hlm 137

<sup>39</sup> Kartini Kartono, *pantologi sosiologi 3* (gangguan-gangguan kejiwaan) Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997, hlm. 209



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digolongkan menjadi kegiatan yang menyimpang atau kegiatan negatif yang merugikan dirinya dan orang lain.<sup>40</sup>

Belakangan timbul tren dalam kehidupan remaja dengan adanya aksi balap liar,Dimana mereka berkumpul di suatu tempat dan mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. pelaku balap liar tidak memperdulikan jika di jalan umum ada pengendara lain, tujuan utama mereka adalah memenangkan balap liar yang digelar saat itu.Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri.Tujuan utama tetap mencapai garis finis di depan.Para pelaku balap liar memang meresahkan, tidak hanya warga sekitar, pengguna jalan lain namun jugak pihak berwajib.Aksi balap motor merupakan aksi balap motor secara ilegal yang dilakukan mayoritas dari para remaja .Banyak remaja yang lebih menuruti egonya dari pada keselamatan dirinya.<sup>41</sup>

## 2. Faktor penyebab Balap liar

- a. Ketiadaan fasilitas srikuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jika pun tersedia,biasnya harus melaui proses panjang.
- b. Gensi dan nama besar, selain itu balap motor jugak merupakan ajang adau gensi dan pertarungan nama besar.
- c. Kemudian uang taruhan jugak menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.

<sup>40</sup>Ramlan naning, *mengairahkan kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Berlalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu,1983),hlm.26

<sup>41</sup>[www..makala balap liar.blogspot.com](http://www.makala balap liar.blogspot.com).di akses pada tanggal 14 Mei 2021.Pukul 8.40

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kesenangan dan memicu adrenalin. Bagi pelaku balap motor liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar, dan rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
- e. Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak dan sebagainya juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balap motor liar. Selain itu pengaruh ajakan teman juga dapat menjadi faktor.<sup>42</sup>

### 3. Dampak Negatif Balap Liar

Selain itu disisi lain kegiatan balap motor ini terdapat dampak negatif di antaranya :

- a. Penyalagunaan narkoba : berawal kumpul-kumpul antara geng motor kemudian mencoba-coba merokok dan pada akhirnya terjerumus oleh narkoba
- b. Prilaku menyimpang : biasanya anak muda atau remaja yang mengikuti balap motor memiliki prilaku yang menyimpang tidak seperti lainnya.
- c. Tindakan kriminal : untuk membeli peralatan yang mahal untuk memodifikasi para remaja membutuhkan dana yang sangat besar. Bahkan ada yang menggunakan jalan untuk mencuri untuk mengumpulkan dana cepat tanpa berusaha bekerja .

<sup>42</sup>Kartini Kartono, *Pantologi Sosial Kenakalan Remaja* ,(Jakarta : Rajagrafindo persada 2004), hlm, 44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sarana perjudian : dalam ajang kegiatan ini banyak untuk perjudian. Tidak hanya bagi pembalap tetapi juga bagi penonton. Taruhannya tidak tanggung-tanggung .bahkan sepeda motor untuk balap bisa dipertaruhkan
- e. Ancama kematian : dunia balap liar berbeda dengan balap resmi atau dregance yang menggunakan alat yang sangat lengkap .Tetapi pada balap liar standar keamanannya minim yang hanya memakai pakaian yang dimilikinya .Tidak jarang banyak joki yang meninggal akibat terjadinya kecelakaan antar pembalap.<sup>43</sup>

**C. Sanksi Hukum Balap Liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Sesuai dengan undang-Undang N0.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketentuan Pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam pasal 283, pasal 284, pasal 287, Ayat (5), pasal 297, pasal 311 Ayat (I). Adapun rincian adalah sebagai berikut :

Pasal 283

*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dengan pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).*

<sup>43</sup> [www..makala balap liar.blogspot.com](http://www..makala balap liar.blogspot.com). di akses pada tanggal 14 Mei 2021



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 284

*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*

Pasal 287 Ayat (5)

*(5) setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar atau batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*

Pasal 297

*Setiap orang yang mengemudi kendaraan Bermotor bebalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)*

Pasal 311 Ayat (1)

*(1) setiap orang yang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor Balap dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana paling banyak Rp.3.000,000,00 (tiga juta rupiah).<sup>44</sup>*

<sup>44</sup>Lihat pasal 283,284,287,297,pasal 311 undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintasa dan Angkutan Jalan.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### D. Siyasah Dusturiyah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Dalam bahasa arab Kata figih berasal dari kata fagaha-yafgahu-fighan. Berarti mengerti atau memahami. Secara bahasa figih adalah paham yang mendalam. Imam al-Tarmidzi, seperti di kutip Amir Syarifuddin, menyebut “figih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “fagaha” diungkapkan dalam Al-gur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (gath’i), figih merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (Zhanni).<sup>45</sup>

Secara Terminologis, figih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil -dalil yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-gur’an dan As-Sunnah), jadi figih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-gur’an dan Sunnah yang di susun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>46</sup>

Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, di samping membicarakan aspek hubungan antara manusia dengan Tuhanya (ibadah), fiqih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek Muamalah ini pun dapat dibagi menjadi jinayah

<sup>45</sup> Muhammad igbal *figihs iyasah*, (Jakarta: Prenemedia Group, 2014) hlm,3

<sup>46</sup> Juhaya S.Pradja, *Figih siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) hlm.12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pidana), Munakhat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa'at (hukum acara), (siyasah politik ketatanegaraan) dan al-ahkam al- dau-liyah hubungan internasional.<sup>47</sup>

kata siyasah berasal dari kata yang berarti mengatur, mengurus, memerintah dan pemerintah, politik, dan pembuat kebijakan. pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersipat politik untuk mencakup sesuatu. secara terminologi Abdul wahab Khla'ff mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang disiapkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslatan serta mengatur keadaan, sementara lavis ma'ruf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. adapun Ibnu Mazhur mendefinisikan siyasah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada keselamatan.<sup>48</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslatan bagi manusia itu sendiri. sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqih siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan keamanan, menjalankan kekuasaan yang diberikan

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal: *Op. Cit*, hlm. 3

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 4



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaanya.

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan. Dari perbedaan pendapat tersebut, maka pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan, yang mengatur hubungan antara warga Negara lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara lain dalam batas-batas administrative suatu Negara. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Siyasah Dauliyah disebut juga politik luar negeri, yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan (siyasah harbiyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan perang, dan gencatan senjata.
- c. Siyasah Maliyah disebut juga politik keuangan dan moneter, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik Negara. Bagian ini Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>49</sup>

## 2. Pengertian Siyasah Dusturiyah

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian kajian *fiqh siyasah* yang di dalamnya membahas mengenai prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan bagi pemerintahan dalam sebuah negara yang perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat-istiadat masuk di dalamnya.<sup>50</sup>

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “*seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama*”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berarti asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>51</sup>

*Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A’la Al-Maududi mengatakan

<sup>49</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2003), hlm. 31

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 198

<sup>51</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 19

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa istilah *dustur* artinya “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara.”<sup>52</sup>

Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-qur'an dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.<sup>53</sup>

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>54</sup>

Jadi *siyasah dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid*

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 20

<sup>54</sup>*Ibid*

<sup>55</sup>*Ibid*



### 3. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Pembuatan undang-undang dan lahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara merupakan hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah*.<sup>56</sup>

Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan Islam adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.<sup>57</sup>

Jubair sitomorang mengatakan objek kajian *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang *Waliyul Ahdi*;
- e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
- f. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*;
- g. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer;

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 22

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 21

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Kajian tentang pemilihan umum.

Sumber kajian-kajian *siyasah dusturiyah* tersebut adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *maqassid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.<sup>58</sup>

#### 4. Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah

Pada bagian ini akan dibahas konsep-konsep kekuasaan dalam *siyasah dusturiyah* antara lain:

- a. Konstitusi

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Pembahasan konstitusi berkaitan dengan prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang yaitu jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>59</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media group, 2014), hlm.178

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen di bagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa Klausul dalam rumusan undang-undang dasar tersebut.<sup>60</sup>

Kemudian, agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar pengundangnya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan, sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang dasar tersebut diterapkan.<sup>61</sup>

#### b. Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasryi'iyah*, yaitu kekuasaan

---

<sup>60</sup>*Ibid*

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm.179



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam surah *al-An'am*, 6: 57 (*in al-hukm illa lillah*). Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadhiyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT. dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai nilai dasar syariat Islam.<sup>62</sup>

Jadi, dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah*nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm.187

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebenarnya, pembagian kekuasaan, dengan beberapa kekhususan dan perbedaan, telah terdapat dalam pemerintahan Islam jauh sebelum pemikir-pemikir Barat merumuskan teori mereka tentang *Trias Politica* yaitu kekuasaan *tasryi'iyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidziyah* (eksekutif), dan kekuasaan *qadha'iyah* (yudikatif). Hal ini telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. di Madinah. Sebagai kepala negara, Nabi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuanya bermuara kepada Nabi juga. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan tugas-tugas tersebut pun berkembang dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa dan tempat.<sup>63</sup>

c. Ummah

Kata “*ummah*” diindonesiakan menjadi kata umat adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat, akan tetapi sering dipahami secara keliru. Istilah ini, karena begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari yang sering terabaikan dan tidak dianggap sebagai pengertian ilmiah. Dari kalangan Islam, pembahasan konsep ummah antara lain dilakukan oleh Ali Syari'ati dalam bukunya *al-ummah wa al-Imamah* dan Muhammad Quraish Shihab dalam bagian karya tafsir tematiknya *wawasan Al-Qur'an*.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm.188

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm.206

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Ensiklopedia Indonesia umat mengandung empat macam pengertian, yaitu: (1) bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan, (2) penganut suatu agama atau pengikut nabi, (3) khalayak ramai, dan (4) umum, seluruh, umat manusia.<sup>65</sup>

Dalam piagam Madinah, pemakaian kata ummah mengandung dua pengertian yaitu: pertama, organisasi yang diikat oleh akidah Islam. Kedua, organisasi umat yang menghimpun jamaah atau komunitas yang beragam atas dasar ikatan sosial politik, seperti tersurat tersurat dalam pasal 25. Dalam pasal ini, Yahudi tidak dimaksudkan sebagai pengertian agama tetapi pengertian suatu kelompok dalam sebuah negara Madinah. Hal ini juga diisyaratkan dengan dipadankannya kata “Yahudi” dengan kata “*Mukminin*”, tidak dengan kata “*Muslimin*”, untuk menunjukkan agama. Berdasarkan pasal ini, Abduh menegaskan bahwa konsep ummah dalam Islam diikat berdasarkan agama dan kemanusiaan. Nabi SAW dapat menjalin kerja sama dengan Yahudi berdasarkan semangat kemanusiaan ingin menegakkan tatanan masyarakat yang etis dan demokratis.<sup>66</sup>

Al-Qur'an menegaskan bahwa umat Islam merupakan umat pertengahan (*ummatan wasathan*) yang harus menjadi teladan manusia lainnya karena ummah dilandasi oleh semangat universal

---

<sup>65</sup>*Ibid*

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm.208-209



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, maka Islam tidak dapat membenarkan nasionalisme sempit yang menganggap tanah, wilayah, ras, darah dan hal-hal lainnya yang sangat *artifisial* akan mengarahkan manusia pada pengagungan nilai-nilai *tribalisme* dan *primordialisme* yang sesungguhnya sangat ditentang oleh Islam. Menurut moten terdapat perbedaan antara nasionalisme dan *ummah*:

- 1) Nasionalisme menegaskan kesetiaan pada negara, sedangkan *ummah* menekankan kesetiaan manusia pada kemanusiaan itu sendiri;
- 2) Sumber kekuasaan dan legitimasi dalam nasionalisme adalah negara dan intitusi-intitusi lainnya, sedangkan sumber kekuasaan dan legitimasi dalam *ummah* adalah syari'ah;
- 3) Nasionalime memiliki basis pada etnik, bahasa, ras dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, sedangkan basis *ummah* diikat oleh *tawhid*, kepercayaan pada keesaan Allah;
- 4) Nasionalisme membatasi manusia berdasarkan territorial, sedangkan *ummah* tidak terbatas oleh wilayah-wilayah. *Ummah* bersifat universal;
- 5) Nasionalisme menolak kesatuan kemanusiaan, sedangkan *ummah* mendukung persaudaraan kemanusiaan yang universal;
- 6) Nasionalisme memisahkan manusi pada bentuk negara-negara kebangsaan, sedangkan *ummah* menyatukan seluruh dunia Islam.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm.211

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Syura dan Demokrasi

Kata “syura” berasal dari bahasa *sya-wa-ra* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi “*musyawarah*” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.<sup>68</sup>

Sebagian ulama memandang bahwa perintah musyawarah kepada Nabi SAW hanyalah dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan taktik dan strategi perang menghadapi musuh. Menurut mereka para pemuka Arab, kalau tidak diajak bermusyawarah dalam urusan mereka, akan kecewa dan kecil hati. Karenannya, Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk melakukan musyawarah dengan mereka, supaya lebih mempercepat hubungan dengan mereka dan menghilangkan rasa kecewa di kalangan mereka. Menurut sebagian ahli tafsir, masalah musyawarah ini dibatasi terhadap urusan-urusan duniawi yang tidak ada wahyunya, bukan persoalan agama. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa musyawarah dapat dilakukan dalam masalah-masalah keagamaan dengan alasan bahwa terjadinya perubahan sosial sering dengan

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm.214

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan ilmu pengetahuan membuat sebagian permasalahan agama juga ikut terimbas dan menuntut “penyesuaian”, karena Al-Qur’an dan sunnah belum menentukan cara penyelesaian secara terperinci dan tegas.

Pemahaman ini dapat disimpulkan, bahwa masalah-masalah yang sudah baku dan perinci diuraikan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak mendapat tempat untuk dimusyawarahkan. Karena, Islam tidak membenarkan melakukan musyawarah dalam masalah-masalah seperti dasar-dasar keimanan atau ibadah kepada Allah. Sebaliknya, terhadap masalah-masalah yang dijelaskan Allah dan Rasul-Nya secara global dan umum atau tidak dijelaskan sama sekali, maka umat Islam diperintahkan untuk melakukan musyawarah sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>69</sup>

Adapun bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan secara terperinci. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam satu pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti perlemen atau apapun namanya.<sup>70</sup>

Dalam pengambilan keputusan, tidak berarti suara terbanyak mutlak harus diikuti. Adakalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas. Sebagai contoh, Khalifah Abu Bakar pernah mengabaikan suara mayoritas dalam masalah sikap terhadap para

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 216-217

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm. 219



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangkok zakat. Pada pemerintahan Umar beliau pernah menolak pendapat mayoritas tentang pembagian perampasan perang berupa tanah Sawad (Irak).<sup>71</sup>

Sebagaimana halnya syura di atas, demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagaimana didefinisikan Abraham Lincoln, salah seorang mantan Presiden Amerika Serikat, mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintah yang berkuasa. Disamping itu Sadek , mantan duta besar Oman untuk PBB, menemukan tujuh prinsip utama demokrasi:

- 1) Kebebasan berbicara;
- 2) Pelaksanaan pemilu yang Luber (lansung, umum, bebas,rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) secara teratur;
- 3) Kebebasan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas;
- 4) Rakyat dengan bebas mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya;
- 5) Demakrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
- 6) Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum.

---

<sup>71</sup>*Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Semua individu atau kelompok bebas melakukan perbuatan.<sup>72</sup>

Berdasarkan hal diatas bahwa demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip syura sebagaimana diajarkan Al-Qur'an secara esensi, baik demokrasi maupun syura sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. Secara prinsip, konsep syura berasal dari "langit" yang diwayuhkan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, sedangkan demokrasi adalah konsep ciptaan manusia yang lahir dari Barat.<sup>73</sup>

#### E. Peran Pemimpin Dalam Islam

Peran Pemimpin dalam Islam pada dasarnya adalah menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah SWT. Seorang pemimpin bagaimanapun besar kecil wilayah kepemimpinannya selalu mengemban peran yang strategis.

Menurut Saifuddin Herlambang ada tiga kriteria atau sifat dalam Islam yang harus dimiliki pemimpin yaitu:

##### 1. Integritas

Dalam hal kepemimpinan, ada empat sifat wajib Rasulullah Saw yang merupakan pencerminan karakter beliau dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Inilah yang mungkin dapat dicontoh

<sup>72</sup>Ibid, hlm. 220-221

<sup>73</sup>Ibid, hlm.222

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh seorang pemimpin agar ia dikategorikan sebagai pemimpin yang memiliki integritas. Sifat-sifat Rasulullah antara lain:

- a. Pemimpin yang jujur (*Shiddiq*) yaitu benar secara lisan maupun perbuatan.
- b. Pemimpin yang *Amanah* yaitu orang yang dapat dipercaya.
- c. pemimpin yang *Tabligh* yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang ditujukan kepada umat manusia.
- d. Pemimpin yang *Fathanah* yaitu memiliki kecerdasan.<sup>74</sup>

#### 2. Bersikap Adil

Pemimpin harus bersikap adil karena dengan berlaku adil, hukum ditengah-tengah masyarakat dapat ditegakkan dan segala urusan manusia akan berjalan dengan penuh kemaslahatan.<sup>75</sup>

#### 3. Memiliki Kemampuan

Sebagai pemimpin negara maupun pemimpin daerah juga harus memiliki kemampuan. Dengan demikian setiap ada permasalahan ditengah masyarakat ada jalan keluar untuk mengatasinya.<sup>76</sup>

Dalam Al-Qur'an mengajarkan kepada umat Islam bahwa konsep kepemimpinan adalah kekuasaan yang berada di genggamannya Allah SWT. seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga Janganlah kamu mengkhianati amanat yang

<sup>74</sup>Saifuddin Herlambang, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*, (Kalimantan Barat: Ayunindya, 2018), h. 54

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm. 57

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm. 59



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.* (Q.S Al-Anfal : 27).<sup>77</sup>

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah SWT. menyeru kaum Muslimin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larangan-larangan-Nya, yang telah ditentukan dengan perantaraan wahyu. Tidak mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka, yaitu mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut ketertiban umat, seperti urusan pemerintahan, urusan perang, urusan perdata, urusan kemasyarakatan dan tata tertib hidup masyarakat. Untuk mengatur segala macam urusan yang ada dalam masyarakat itu diperlukan adanya peraturan yang ditaati oleh segenap anggota masyarakat dan oleh pejabat-pejabat yang dipercaya mengurus umat.<sup>78</sup>

Jadi kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah. Seorang pemimpin juga harus adil dan jujur dan seorang pemimpin bangsa hakekatnya ia mengemban amanah Allah sekaligus amanah masyarakat. Amanah itu mengandung konsekuensi mengelola dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan harapan untuk mencapai kemaslahatan.

#### F. Polisi Dan Kepolisian

##### 1. Istilah Polisi dan Kepolisian

Ditinjau Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada

<sup>77</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*: Juz 1-30, Op. Cit, h. 180

<sup>78</sup> <http://kalam.sindonews.com/ayat/27/8/al-anfal-ayat-27>, Diakses pada tanggal 01 Juni 2021 pukul 13:56 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian NRI

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada
- d. masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma<sup>79</sup>.

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas di bidang Represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas Represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

<sup>79</sup>Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polisi*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.hlm. 22.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
- g. terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- h. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- j. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikabantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
- k. 10.Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas
- l. kepolisian.

**Wewenang Di Bidang Proses Pidana :**

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangkapyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan surat; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Mengadakan penghentian penyidikan;
- h. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- i. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- j. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab<sup>80</sup>.

Wewenang Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan jugadiatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Sedangkan kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah

<sup>80</sup> Pasal 15 Ayat 1, 2 dan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana judi balap liar yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa polisi diartikan:

- a. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum;
- b. Anggota dari badan tersebut diatas

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa kepolisian sebagai badan Pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti terkait peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru dalam menertibkan balap liar dapat diambil sebagai berikut :

1. Peran polsek satlantas tampan kota pekanbaru dalam penertiban balap lair adalah memberikan sanksi berupa Tilang,denda, penyuluhan,nasihat sosilisasi, pus up, melakukan bersih-bersih.melakukan pencegahan dengan patroli, melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemberian sanksi,terhadap pelaku balap liar yang mengganggu ketertiban dan kelancaran berlalu lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal II5 huruf b dan pada pasal 297 menyebutkan bahwa di pidana dengan pidana yang menegaskan dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun atau denda paling banyak RP.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah terhadap pelaku balap liar untuk memberikan efek jera dan agar untuk tidak melakukan balap liar .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor yang mempengaruhi polsek tampan kota pekanbaru dalam menertibkan balap liar dilingkungan stadion utama riau yaitu Karena Dapat mengganggu ketertiban umum dan kelancaran berlalu lintas, Dapat mengganggu para warga masyarakat yang sedang berolah raga baik sipejalan kaki, pesepeda, motor dan mobil yang melintas, Sangat mengganggu Ketenteraman Warga masyarakat sekitar akibat dari suara-suara yang keras yang ditimbulkan oleh suara kenalpot balapan, Masyarakat sekitar kalau mau keluar misalnya ketoko jadi gak berani atau takut digangu kerena ada balapan liar di jalan yang dilewati, Membuat orang tua khawatir, Melanggar Aturan-aturan yang sudah berlaku, dan berakibat fatal yang menyebabkan pelaku balap liar tersebut kehilangan nyawa sendiri.
3. Tinjauan fiqih siyasah yang berkaitan dengan masalah ini adalah Siyasah Dusturiyah, yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, tujuan pemerintah adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, maslahat itu sejalan dengan kehendak syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, apabila maslahat itu diabaikan dapat menimbulkan instabilitas terhadap kehidupan manusia. Menurut penulis peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru sudah sesuai untuk kita semua agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan nyawa baik diri sendiri maupun orang lain untuk kemaslatan agar tidak mengabaikan peraturan-peraturan yang ada dan hal ini sudah sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.



## B. Saran

Dari permasalahan yang ditemukan di atas, maka penulis menyarankan dalam rangka menertibkan balap liar dilingkungan stadion utama maka :

1. Kepada pemerintah Razia/patroli balap motordi stadion utama di harapkan terus menerus dilakukan oleh pihak kepolisian dan harus selalu ada dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus balap liar atau bahkan bisa hilang dengan adanya upaya polisi dalam melakukan pencegahan balap motor liar tersebut secara rutin dan penuh tanggung jawab, penyuluhan tentang bahayanya balap liar ke sekolah-sekolah,memasang spanduk-sepanduk tentang aturan wajib berlalu lintas dan bahaya nya balap liar diarea stadion utama riu.
2. Kepada masyarakat Diharapkan dengan adanya aturan Lalu Lintas,Masyarakat khususnya pelajar lebih taat hukum dan lebih paham hukum karena hukum yang dibuat bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih selamat dan tertib dijalan raya maka aktivitas dijalan pun menjadi seperti yang diharapkan bersama tanpa hambatan dan halangan.
3. Kepada pelaku balap liar untuk mewujudkan ketertiban dijalan raya yang nyaman,tanpa ada hambatan dan halangan diharapkan tidak melakukan balap liar di tempat tempat umum.
4. wajibnya taat kepada pemerintah merupakan suatu keseharusan bagi umat agar terhindar dari kemudratan yang dapat membahayakan jiwa orang lain.untuk itu tunduk dan patuh lah pada ulil amri merupakan suatu kewajiban ibadah taat patuh kepada perintah Allah SWT,

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku –Buku:

- Amiruddin, *pegantar Metedologi penelitian Hukum*, Jakarta : PT Rajawali persada.2003.
- Arimbi, Horoeopetre.Ahmad Santoso Ahmad, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan* , Jakarta: Walhi.2003.
- Asshofa,Burhan.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Pres.Cet.Ke-6.2010.
- Bhara, Adib.125 *Tanyak jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas* , Yogyakarta: Pusta Yustika. 2010.
- Brotdiredjo.Soebroto. *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri*, Jakarta.1997.
- Djazuli.*Figih siyasa*.Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.2003.
- Herlambang, Saifuddin.*Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*, Kalimantan Barat: Ayunindya.2018.
- Igbal,Muhammad. *Figih siyasa*, Jakarta: prenamedia Group.2014.
- Iqbal, Muhammad.*Fiqh Siyasa*. Jakarta: Prenada Media group.2014.
- Irawan, Prasetya.*Logika dan Prosedur Penelitian*.Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.1995.
- Katono,Kartini.*Pantologi Sosial Kenakalan Remaja* ,Jakarta : Raja grapindo persada.2010.
- Muhammad, Ja'far Abu.*Tafsir Ath-thabiri* , Terj. Akhmad Affandi Jakarta : Pustaka Azzam .2016.
- Naning,Ramlan.*Mengairahkan kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Berlau Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu.1983.
- Raadayanto,Dwi Yosep.*Upaya dan kendala polisi dalam menangulangi tindak pidana perjudian balap motor liar di kabupaten selem*,Yogyakarta .2014.
- Ritzer Goerge dan Douglas J Goodman, *teori sosiologi*, Yogyakarta: kreasi.2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wacana kartono, Kartini. *Patologi sosial 3* (gangguan-gangguan kejiwaan) Jakarta: PT.Raja Grafindo persada.1997.

S.Pradja,Juhaya. *Figih siyasah* , Bandung: Pustaka Setia ,2015.

Sarwono,Wirawan.Sarlito.*Teori-Teori psikologi sosiaal* Jakarta: Rajawali Pres .2015.

Satori, Djaman. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.Cet.Ke-4.2014.

Situmorang. Jubir. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.2012.

Soewadji, Jusup. *pegantar metodologi penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media.2012.

Suggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* , Jakarta : Rajawali Pres.2012.

Suhardono, Edy.*Teori Peran ( Konsep ,Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta : PT Grenmedia Pustaka Utama .1994.

## Al-Qur'an:

Depertemen Agama RI.*Al-Qur'an dan Terjemahan*.Bandung: Sygma.2009.

Kementrian Agama RI.*Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah: Juz 1-30*.Bandung:Syaamil Qur'an

## Kamus:

Poerwadarminto, W.J.S.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta: PN Balai Pustaka.1984.

## Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 503, Pasal 539 dan Pasal 360. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Liit pasal 115 huruf b, Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Lihat pasal 283,pasal 284,pasal 287,pasal 297,pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lihat Pasal 15 Ayat 1, 2 dan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

### Jurnal

*Ejournal Ilmu Komunikasi* , (2) : 39-48 ISSN 0000-0000, ejoernal. Ikom. Fisip unmul. ac.id.2014.(Diakses tanggal 11 september 2020 pukul 17:30 WIB).2014.

### Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja>.( Di akses pada tanggal 28 april 2021, pukul 14:14 WIB)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Balap\\_motor](https://id.wikipedia.org/wiki/Balap_motor) (Di akses pada tanggal 28 april 2021 pukul 15:09 WIB)

[https:// konsultasi syariah.com/22308/tata lalu lintas termasuk ibadah hal I.](https://konsultasi.syariah.com/22308/tata-lalu-lintas-termasuk-ibadah-hal-I) (Diakses pada tanggal 24 september 2020 pukul 12 :00 WIB)

Johanes Papu Sejarah dan Jenis Perjudian, diakses dari [www gogle.co.id](http://www.google.co.id) (Di akses pada Tanggal 7 September 2020 pukul 20:17 WIB)

[https// konsultasi syariah.com/22308/tata lalu lintas termasuk ibadah hal I.](https://konsultasi.syariah.com/22308/tata-lalu-lintas-termasuk-ibadah-hal-I) diakses pada tanggal 24 september 2020 pukul 12 :00 Wib.

[www.pekanbaruexpress.com](http://www.pekanbaruexpress.com)(Diakses pada tanggal 24 februari 2021 pukul 14:33 WIB)

[www.Riaupos.co/656-spesial-pengelolaan-Venue-belumfinalhtm](http://www.riaupos.co/656-spesial-pengelolaan-Venue-belumfinalhtm) (Diakses pada tanggal 24 februari 2021 pukul 14:33 WIB)

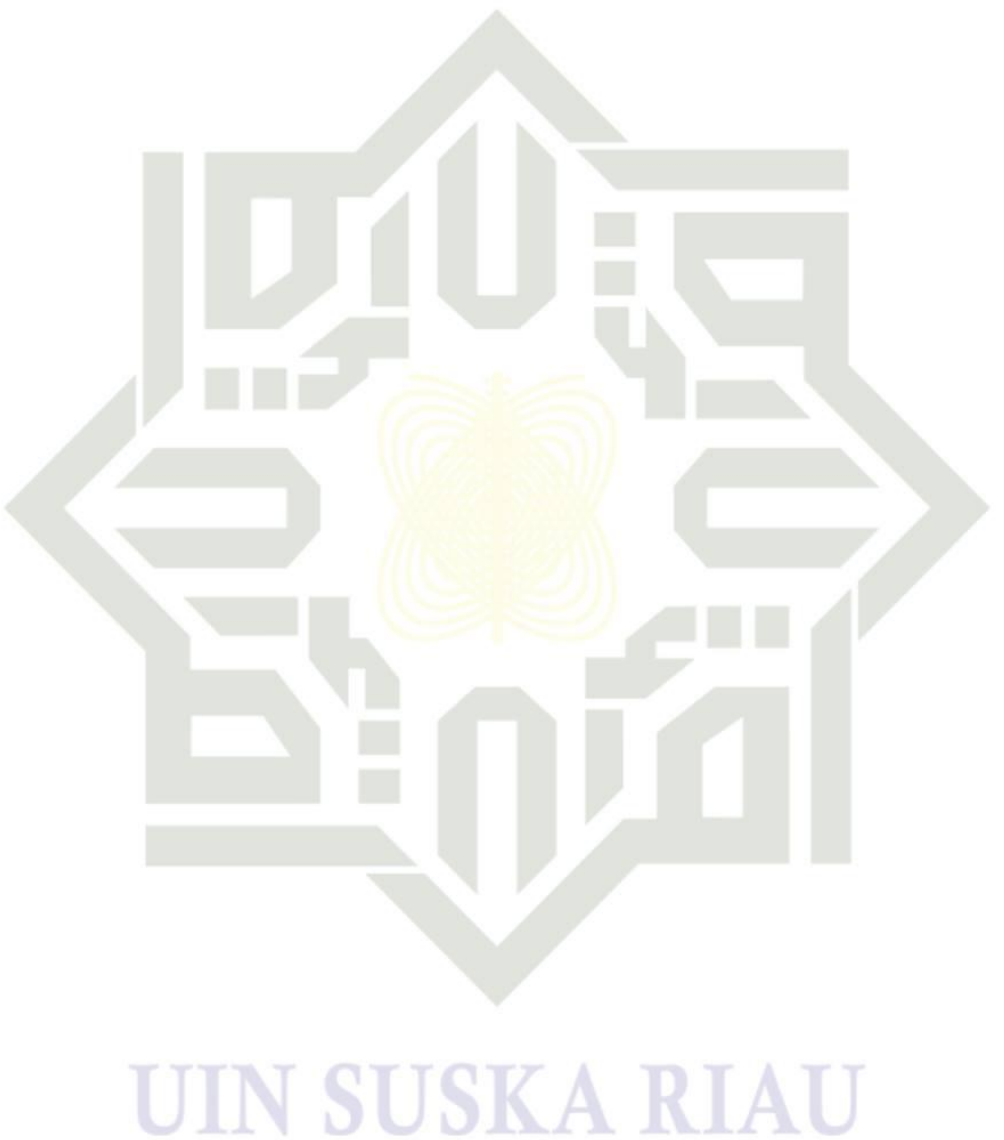
[http//m.riaupos.co/35057-berita-angka-kriminalitas-distadion-utama](http://m.riaupos.co/35057-berita-angka-kriminalitas-distadion-utama)(Diakses pada tanggal 24 februari 2021 pukul 14:33 WIB)

[www..makalah balap liar.blogspot.com](http://www.makalahbalapliar.blogspot.com).(Di akses pada tanggal 14 Mei 2021 pukul 8.40 WIB)

[www..makalah balap liar.blogspot.com](http://www.makalahbalapliar.blogspot.com).(Di akses pada tanggal 14 Mei 2021 pukul 9.12 WIB)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://kalam.sindoneews.com/ayat/27/8/al-anfal-ayat-27>, (Diakses pada tanggal 01 Juni 2021 pukul 13:56 WIB)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Dengan Bapak Fitri Satlantas Polsek Tampan**



**Wawancara Dengan Pelaku Balap Liar Ikbal Ramadan**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Dengan Pelaku Balap Liar Riki Ardilah Firdian**



**Wawancara Dengan Pelaku Balap Liar Rama**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Dengan Bapak Ronal Satlantas Polsek Tampan.**



**Wawancara Dengan Bapak Ronal Satlantas Polsek Tampan.**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul "PERAN POLSEK TAMPAN KOTA PEKANBARU  
DALAM MENERTIBKAN BALAP LIAR DILINGKUNGAN STADION UTAMA  
RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
JALUR LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PRESFEKTIF FIQIH SIYASAH

ditulis oleh saudara :

Nama : Nina Rahma Panggabean  
NIM : 11724202947  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis/15 Oktober 2020  
Narasumber : Ade Fariz Fahrullah.M,Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,  
Narasumber

Jalimus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Ade Fariz Fahrullah

NIP.196711122005011006





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Di Lingkungan Stadion Utama Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Fresfektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh :

Nama : Nina Rahma Panggabean  
NIM : 11724202947  
Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H.Rahman Alwi , M.Ag**

Sekretaris  
**Marzuki, M.Ag**

Penguji I  
**Kamiruddin, M.Ag**

Penguji II  
**Haswir, M.Ag**

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jahidus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nina Rahma Panggabean  
 NIM : 11724202947  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (SIYASAH)  
 Judul : Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Fesfektif Fiqih Siyasa

Pembimbing : Irfan Zulfikar, M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL  
 NIP. 198804302019031010

Cipta D Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38441  
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/FH/PP.009/1615/2021 Tanggal 1 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : NINA RAHMA PANGGABEAN  |
| 2. NIM / KTP         | : 11724202947  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PERAN POLISI SATLANTAS POLSEK TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM MENERTIBKAN BALAP LIAR BERDASARKAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM PRESEFEKTIF FIQIH SIYASAH. |
| 7. Lokasi Penelitian | : POLSEK TAMPAN KOTA PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 5 Februari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

# UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kepolisian Sektor Tampar di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

4. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nina Rahma Panggabean, Lahir di Bangko Pusaka tanggal 24 Agustus 1996. Anak keempat dari delapan bersaudara dari pasangan Ayahanda Alimuda panggabean dan Ibunda Erti Ritonga.

Pendidikan yang ditempuh penulis :

1. SDN 016 Bangko Pusaka Lulus Tahun 2009
2. SMPN 04 Bangko Pusaka Lulus Tahun 2012
3. SMAN 03 Bangko Pusaka Lulus Tahun 2015

Setelah dinyatakan lulus dari SMAN 03 Bangko Pusaka Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017 di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pada tahun 2017 tersebut penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara melalui jalur UMPTKIN pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tanggal 1 Juli hingga 15 Agustus 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan indah paret Kota Pekanbaru serta melakukan Kuliah Keja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Plus pada 15 Juli hingga 31 Agustus 2020 Garuda Sakti km 4.

Berkat do'a dan Motivasi dari keluarga serta teman-teman seperjuangan yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Presfektif Fiqih Siyasah ”**. Lulus setelah dimunaqasyakan dengan predikat lulus sangat memuaskan pada tanggal 15 Juli 2021 dan berhak mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).